



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**MANIPULASI GAS LPG 3KG BERSUBSIDI DIKAJI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

ADAM KAMESWARA BHAKTI NAGARA

NPM : 211003742018463

**SEMARANG**

**2025**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**MANIPULASI GAS LPG 3KG BERSUBSIDI DIKAJI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN  
GAS BUMI**

**SKRIPSI**

Telah Dilakukan Pengujian Dihadapan Tim Penguji  
dan Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

**Disusun oleh :**

**ADAM KAMESWARA BHAKTI NAGARA**

**NPM. 211003742018163**

Mengesahkan :

Tim Penguji

Ketua, —

Sri Setiawati, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621016301

Anggota

Widayanti, SE. SH. MH

NIDN : 062707700002

Anggota

Dr. Krismiyarsi, SH. M.Hum

NIDN : 0627076301

Mengetahui :

Dekan



Prof. Dr. T. Lischiyono, S.H., M.Hum

NIDN. 0625046301

**SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manipulasi gas LPG 3kg bersubsidi dalam perspektif hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas LPG 3kg bersubsidi merupakan program pemerintah untuk menjamin keterjangkauan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, maraknya praktik manipulasi seperti penimbunan, pengalihan penggunaan, dan penjualan ilegal ke sektor komersial telah mengganggu efektivitas program ini serta merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen hukum, dan peraturan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi LPG bersubsidi melanggar prinsip pengelolaan sumber daya energi yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 33 UU No. 22/2001, yang menekankan prinsip manfaat, keadilan, dan keberlanjutan. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan distribusi dan penetapan harga khusus untuk kelompok masyarakat tertentu. Namun, implementasi sanksi terhadap pelaku manipulasi masih lemah akibat kurangnya koordinasi antarlembaga dan ketidakjelasan mekanisme pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan, peningkatan pengawasan terintegrasi, serta sosialisasi hukum untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran sesuai amanat UU No. 22/2001.

Kata Kunci: LPG Bersubsidi, Manipulasi, UU No. 22 Tahun 2001, Hukum Energi, Kebijakan Publik.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Pengertian Tindak Pidana .....	8
B. Tinjauan Pengertian Manipulasi .....	9
C. Tinjauan Pengertian Undang-Undang yang mengatur tentang eksploitasi gas LPG 3kg bersubsidi.....	11
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 .....	11
2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 .....	11
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.....	11
D. Tinjauan pengertian Pertamina .....	11
E. Tinjauan Harga Elpiji Bersubsidi.....	12
F. Tinjauan Perizinan Distribusi Gas LPG .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Tipe Penelitian .....	20
B. Spesifikasi Penelitian .....	21
C. Sumber Data .....	22
1. Bahan hukum primer .....	22

D. Metode Pengumpulan Data .....	23
E. Metode Penyajian Data .....	24
F. Metode Analisa Data.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Bentuk pengaturan terkait Minyak & Gas Bumi yang ada dalam kasus Manipulasi Gas 3 kg putusan No 669/PidSus/2021/PTSMG.....	26
1. Regulasi Umum Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.....	26
2. Tujuan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia .....	26
B. Penyelesaian Perkara Manipulasi Gas LPG 3 kg putusan No 669/PidSus/2021/PTSMG .....	42
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran untuk Pemerintah.....	55